

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Yusuf Ary Tanggumara

212114176

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Yusuf Ary Tanggumara

212114176

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2025



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Oleh:

Yusuf Ary Tanggumara

212114176

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA

Tanggal: 26 Maret 2024



SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TIMUR

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yusuf Ary Tanggumara

NIM: 212114176

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 April 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

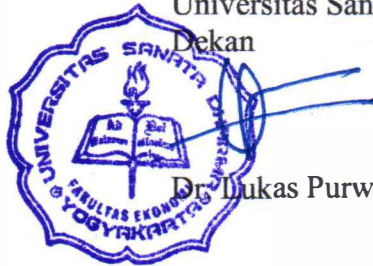
Nama Lengkap

Ketua	Dr. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, CA.
Sekretaris	Agustinus Tri Kristanto, S.E., M.Ak.
Anggota	Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Ak., CA.
Anggota	Aurelia Melinda Nisita Wardhani, S.E., M.Sc.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

Yogyakarta, 30 Mei 2025
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Dr. Lukas Purwoto, M.Si., CRP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu”

Amsal 16:3

“Fortis Fortuna Adiuvat”

John Wick



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Yakobus Hau Tanggumara dan Almh. Mama Chatarina Sri Rochana
Adikku tersayang,
Benyamin Adjie Tanggumara.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR”**

Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 15 April 2025 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan


Yusuf Ary Tanggumara

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yusuf Ary Tanggumara

NIM : 212114176

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Mei 2025

Yang menyatakan,



Yusuf Ary Tanggumara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Romo Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., PhD selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. Lukas Purwoto, M.Si., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang.
3. Dr. Yusef Widya Karsana, M.Si., Ak., CA selaku Ketua program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA selaku dosen pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Trisnawati Rahayu, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing akademik.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.

7. Segenap jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang saya kasihi dan sayangi Bapak Jack, Almh. Mama Sri dan adik Adjie yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Indra Bornok Hutahaeen, Vini Graciela Febynastiti, Lady Fanni Elisabeth Br Tambunan, yang telah bersedia berproses bersama dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Akuntansi Angkatan 21, atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaan selama mengenyam pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
11. Teman-teman seperjuangan kelas MPAT G, yang telah bersama-sama berjuang dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 Mei 2025
Penulis



Yusuf Ary Tanggumara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Teori	9
B. Akuntansi Pemerintah	10
C. Akuntansi Berbasis Akrua.....	14
D. Laporan Keuangan.....	17
E. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Desain Penelitian	28
B. Waktu dan Tempat Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Data Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TIMUR	36
A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	36

B. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	36
C. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	40
D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	41
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis Data	51
B. Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Keterbatasan Penelitian	80
C. Saran	81
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur...	42
Gambar II. Tampilan SAKTI.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI	16
Tabel 2. Komponen Laporan Keuangan	19
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4. Data Umat Beragama Kabupaten Sumba Timur.....	39
Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	43
Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran	67
Tabel 7. Neraca	68
Tabel 8. Laporan Operasional.....	69
Tabel 9. Laporan Perubahan Ekuitas	71



ABSTRAK

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Yusuf Ary Tanggumara

NIM: 212114176

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2025

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, namun dalam penerapannya adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi menjadi salah satu tantangan utama yang memengaruhi keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi berbasis akrual, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF
ACCRUAL-BASED ACCOUNTING IN THE FINANCIAL STATEMENT
OF THE MINISTRY OF RELIGION OFFICE
EAST SUMBA REGENCY**

Yusuf Ary Tanggumara
NIM: 212114176
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2025

Accrual-based Government Accounting Standards is an accounting basis in which economic transactions or accounting events are recognized, recorded and presented in the financial statements when they occur, regardless of when cash is received or paid. This study aims to analyze the application of accrual-based accounting at the Office of the Ministry of Religious Affairs of East Sumba Regency, as well as to determine the factors that influence the success of its application.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The research data used is primary data collected through interviews and document analysis. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study found that the application of accrual-based accounting at the Office of the Ministry of Religion of East Sumba Regency has an impact on increasing the transparency and accountability of financial statements, but in its application, the existence of limited human resources (HR) who have educational qualifications in accounting is one of the main challenges affecting the successful application of accrual-based Government Accounting Standards. This research is expected to provide practical recommendations for improving the quality of financial reports in government agencies.

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual-Based Accounting, Financial Statement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, sistem pengelolaan keuangan di sektor publik mengalami transformasi yang sangat pesat dan kompleks. Transformasi dalam sistem pengelolaan keuangan dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang No.17 Tahun 2003 pada tanggal 23 April 2003. Selain itu menurut Fitri Rahmadany (2024), transformasi dalam pengelolaan keuangan berdampak signifikan pada perbaikan tata kelola dan kualitas birokrasi, khususnya melalui komitmen organisasi dalam menerapkan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan sistem organisasi. Sistem akuntansi memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntansi merupakan bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, penyusunan laporan keuangan diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang merupakan pedoman utama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban sebuah entitas mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan hasil dari penyusunan laporan keuangan ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dan juga menjadi sebuah cerminan transparansi dan akuntabilitas dari sebuah instansi pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan yang akurat dan andal merupakan

sebuah bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi negara (Mardiasmo., 2018).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai tingkat instansi. Standar Akuntansi Pemerintah ini merupakan hasil penyusunan yang dilakukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), yang harus melalui proses pemeriksaan serta persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diterapkan. SAP dirancang agar penyusunan laporan keuangan pada tiap instansi pemerintahan dilakukan dengan standar dan pedoman yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah selaku pembuat keputusan dan peraturan senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Transformasi pada SAP ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan pada sistem akuntansi, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut khususnya yang tertuang dalam pasal 32 disebutkan bahwa bentuk dan penyajian laporan keuangan APBN/APBD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada awalnya, SAP yang berlaku dan diterapkan di Indonesia yaitu SAP berbasis kas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Selanjutnya seiring dengan perkembangan yang ada, SAP basis kas kemudian digantikan dengan SAP berbasis akrual, sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menandakan era baru dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, untuk semakin menegaskan mengenai kewajiban untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di setiap instansi, pemerintah mengeluarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk mengaplikasikan SAP berbasis akrual pada tahun anggaran 2015.

Menurut Simanjuntak (2005) akuntansi berbasis akrual merupakan sebuah basis akuntansi, yang mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi ekonomi dan mencatat aset serta kewajiban. Hal ini, menjadikan pencatatan laporan keuangan menjadi lebih akurat dan transparan. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan pedoman utama yang saat ini wajib diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan di setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi upaya pemerintah untuk semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan setiap instansi, hal ini tentunya sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang menekankan pada efisiensi dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sejalan dengan itu menurut Elsyedkk (2016) akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip NPM. Namun pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Langelo dkk (2015) dan Subhi & Yuhertiana (2021) menemukan bahwa beberapa instansi masih menggunakan akuntansi berbasis kas dan belum siap untuk beralih ke akrual. Langelo dkk (2015) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemahaman akuntansi berbasis akrual, masih ada hambatan terkait sumber daya manusia dan infrastruktur yang menghalangi penerapan yang efektif. Sementara itu, Subhi & Yuhertiana (2021) menekankan perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesiapan instansi dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, Budiono (2016) menunjukkan bahwa tantangan lain dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kurangnya dukungan dari manajemen puncak dan keterbatasan pada sistem informasi akuntansi yang ada.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu instansi pemerintahan yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan bidang agama dan moral bangsa, memiliki kewajiban untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan mereka. Dimana penyajian laporan keuangan ini terbagi menjadi tujuh kategori yakni laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Agar dapat digunakan dengan secara efektif

para pemangku kepentingan, laporan keuangan ini harus disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dipilih sebagai objek penelitian karena instansi ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara. Selain itu, dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, instansi ini menjadi subjek yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapan SAP berbasis akrual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas laporan keuangan dan optimalisasi penerapan SAP.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur?

2. Faktor–faktor apa yang memengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Praktis
Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, diharapkan penelitian ini akan menjadi suatu informasi yang menjadi sebuah masukan untuk mengevaluasi penerapan SAP berbasis akrual yang telah diterapkan.
2. Manfaat Teoritis
Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual pada Lembaga pemerintahan atau sektor publik.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari fenomena yang diteliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dan penunjang dalam pemecahan masalah sehubungan dengan judul penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan seperti, sejarah perusahaan, visi, misi dan tujuan perusahaan, struktur organisasi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian data, analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Menurut Scott (2015) dalam Purba, (2023:25) teori agensi merupakan sebuah perkembangan dari teori yang mempelajari mengenai sebuah kontrak dimana pihak *agent* bekerja atas nama pihak *principal*.

“Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.”(Purba., 2023:23).

Teori agensi muncul ketika adanya suatu kondisi dimana suatu kegiatan bisnis tidak selalu dijalankan secara langsung atau dikelola oleh pemilik sehingga mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pasar modal dunia, semakin mendorong juga mengenai pentingnya teori agensi. Dengan adanya hal ini *agent* semakin dituntut untuk mempertanggung jawabkan keuangan mereka yang harus digambarkan dalam laporan keuangan mereka (Purba., 2023).

2. Teori Entitas (*Entity Theory*)

“Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis bukan pemilik, merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun auditor.” (Ervina dkk., 2022).

Teori entitas merupakan sebuah teori yang muncul sebagai sebuah alternatif dari teori *proprietary*. Konsep dasar dari teori entitas yaitu membahas mengenai pemisahan tugas antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan perusahaan. Dengan adanya pemisahan tugas ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaporan keuangan perusahaan sehingga menjadi lebih objektif, akurat dan transparan.

B. Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran dengan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu & Sondakh., 2016).

Meski pemerintah sering dikaitkan dengan lembaga politik dan ekonomi, akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintahan berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi di lembaga

pemerintah, dan akuntan pemerintah menyediakan laporan terkait pengelolaan keuangan negara (Kusuma., 2013).

2. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagai respon mengenai tuntutan akuntabilitas dan transparansi mengenai sebuah laporan keuangan.

Menurut Budiono (2016) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu standar yang bersifat *legal force* dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta merupakan sebuah standar akuntansi yang hanya diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan SAP sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pendapat lain mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dikemukakan oleh Nopitasari (2022) yang menyebutkan bahwa SAP adalah sekumpulan prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan

dan pelaporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapat suatu keyakinan dimana dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dapat memberikan dampak positif pada kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan dari setiap instansi pemerintahan, mendorong Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun SAP berbasis akrual, yang secara konseptual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang

dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar.

Dalam konteks pengukuran kinerja, SAP berbasis akrual dipercaya dapat menyediakan informasi yang lebih objektif mengenai penggunaan sumber daya ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menjadi instrumen penting dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. PSAP 03 Laporan Arus Kas
- e. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- g. PSAP 06 Akuntansi Investasi
- h. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
- i. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
- j. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
- k. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- l. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi
- m. PSAP 12 Laporan Operasional

C. Akuntansi Berbasis Akrual

1. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Secara umum akuntansi berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui segala bentuk transaksi sehubungan dengan pendapatan, beban, dan aset diakui pada saat terjadinya. Selain itu, akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *new public management* (NPM) (Elsye dkk., 2016).

Menurut BPK Perwakilan Jawa Barat dalam penerapannya terdapat dua pilar utama yang menjadi konsep dasar akuntansi berbasis akrual, yaitu:

a. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak

tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Pengakuan Beban

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini tidak dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

2. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut Elsy dkk (2016) dalam buku Dasar-dasar Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah dikatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan dengan basis akuntansi basis akrual memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*), antara lain:

- a. Menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
- b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
- c. Pengambilan keputusan sehubungan dengan penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

3. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut Rahayu dkk (2014) Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan untuk mengetahui dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Selain itu dengan menerapkan SAP berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang relevan dan transparan yang menjadi

sebuah tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan sehubungan dengan kegiatan ekonomi maupun politik.

Selain itu, menurut Widjajerso dalam Kusuma (2013) terdapat tiga alasan mengapa akuntansi berbasis akrual perlu diterapkan dalam sebuah laporan keuangan, yaitu:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi mengenai hutang dan piutang.
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sewajarnya.
- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang relevan sehubungan dengan informasi aset dan kewajiban.

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

Tahun	Kegiatan
2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual b. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. Ploting beberapa KL dan BUN b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh LK b. <i>Review</i>, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Berbasis AkruaI (Lanjutan)

Tahun	Kegiatan
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2015	a. LKPP CTA dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI b. <i>Rollout</i> SPAN dan Piloting SAKTI c. Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akruaI d. Sosialisasi dan <i>training</i> reformasi akuntansi akruaI untuk BPK, DPR, DPD BAKN dan <i>end user</i> e. Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akruaI

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010, dalam Dora (2014).

D. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumberdaya keuangan suatu instansi yang dalam penyusunannya harus dilakukan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan pada periode tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.(Fauzia., 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2011) dalam Ningtyas & Widyawati (2015:5), yang menyatakan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 memiliki perbedaan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Berikut ini merupakan perbedaan komponen laporan keuangan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No.24 Tahun 2005:

Tabel 2. Komponen Laporan Keuangan

PP No.24 Tahun 2005	PP No.71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok:	Komponen Laporan Keuangan Pokok:
1. Neraca	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Arus Kas	3. Neraca
4. Catatan Atas Laporan Keuangan	4. Laporan Operasional
	5. Laporan Arus Kas
	6. Laporan Perubahan Ekuitas
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan yang berharga terkait tantangan dan keberhasilan implementasi standar ini di instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Langelo dkk (2015) menemukan bahwa masih terdapat instansi pemerintah, seperti di Kota Bitung, yang belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan praktik yang ada di lapangan, dimana banyak instansi masih terbiasa

menggunakan sistem berbasis kas. Temuan ini menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap proses transisi menuju akuntansi berbasis akrual.

Selanjutnya, penelitian oleh Subhi & Yuhertiana (2021) juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan persiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual, banyak instansi yang belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Mereka menekankan bahwa pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual dan untuk mendukung implementasi yang efektif.

Selain itu, penelitian oleh Rahayu dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan transparan. Penelitian ini menekankan bahwa dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, instansi pemerintah dapat lebih baik dalam mengelola dana dan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari penerapan SAP, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian lain oleh Nopitasari (2022) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan standar ini

tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari manajemen serta keterlibatan aktif pegawai dalam proses implementasi.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kesiapan sumber daya manusia, pelatihan yang memadai, serta dukungan manajemen merupakan faktor-faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai penerapan SAP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu memberikan landasan bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam tentang penerapan akuntansi berbasis akrual serta tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh instansi pemerintah dalam proses tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Ningtyas & Widyawati (2015)	Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,024, yang lebih kecil dari 0,05, serta koefisien regresi sebesar 0,622. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penerapan SAP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, yang mencakup aspek relevansi, keandalan, perbandingan, dan pemahaman informasi keuangan oleh para pemangku kepentingan.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
2.	Langelo, Saerang, & Alexander (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bitung masih menerapkan standar akuntansi berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, menggunakan basis Cash Toward Accrual (CTA) dalam penyajian laporan keuangan, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas. Selama beberapa tahun, kesiapan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 masih terhambat oleh kendala seperti kualitas sumber daya manusia, kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM dan mempercepat transisi

Tabel 3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				menuju penerapan standar akuntansi berbasis akrual secara penuh.
3.	Nopitasari (2022)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi	Analisis Komparatif	Penelitian ini mengkaji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dengan laporan operasional yang mencakup semua elemen penting, seperti laporan realisasi anggaran dan neraca. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi juga sering mengalami gangguan, sehingga pelatihan tambahan untuk pegawai sangat diperlukan.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				Meskipun Kabupaten Kuantan Singingi telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa tahun berturut-turut, rekomendasi mencakup peningkatan kualitas laporan keuangan dan perbaikan infrastruktur jaringan untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan.
4.	Kusuma (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kesiapan yang cukup untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, dengan indikator kesiapan yang mencakup komitmen, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan sistem informasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi, seperti

Tabel 3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih dilakukan secara manual, kekurangan jumlah dan kualitas SDM, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Sarana dan prasarana yang ada sudah tersedia tetapi masih belum memadai. Oleh karena itu, model strategis akselerasi yang direkomendasikan termasuk pengembangan SAP berbasis akrual sesuai kebutuhan, penyusunan buletin teknis, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan.
5.	Subhi & Yuhertiana (2021)	Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	<i>Literature review</i> (tinjauan literatur).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Teknologi

Tabel 3. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				Informasi (TI). Kompetensi SDM yang memadai, termasuk pelatihan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja, berkontribusi signifikan terhadap kemampuan pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Di sisi lain, penggunaan TI yang optimal, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan sudut pandang responden yang terlibat langsung dalam proses akuntansi.

Desain ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, dimana peneliti dapat menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Kedua, desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks spesifik penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga hasil penelitian menjadi lebih relevan dan aplikatif bagi instansi yang diteliti. Ketiga, dengan menggunakan desain deskriptif, peneliti dapat menyajikan temuan dalam bentuk naratif yang mencerminkan tantangan dan keberhasilan dalam penerapan sistem akuntansi tersebut.

Oleh sebab, desain penelitian kualitatif saya pilih agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2024 dan berakhir pada bulan Januari 2025.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur yang beralamatkan di Jl. LD Dapawole No.14b, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) subjek penelitian adalah orang atau objek yang menjadi sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus dalam suatu studi. Subjek pada penelitian ini, antara lain:

1. Bapak Huki Yeanri O. Wila Hida, S.Pd., M.M selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
2. Bapak Yakobus Hau Tanggumara, S. Pd selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
3. Ibu Marlin Carolyn Lobo, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

4. Ibu Nur Hidayah selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
5. Bapak Ghazali Sa`fii, A.Md selaku Operatur Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

D. Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Menurut Creswell (2014) data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, atau kuesioner yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini bersifat orisinal dan relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sistem tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh perspektif subjektif dari responden mengenai pengalaman mereka dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2. Data sekunder

Merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan dalam penelitian. Data ini mencakup dokumen, laporan, atau publikasi yang sudah ada sebelumnya. Menurut Creswell (2014) data sekunder dapat berupa statistik, laporan tahunan, atau dokumen resmi lainnya yang memberikan informasi tambahan untuk analisis penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait laporan keuangan yang disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, seperti Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, data sekunder juga mencakup peraturan pemerintah terkait akuntansi berbasis akrual, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan

memengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk menggali informasi secara detail mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Langkah-langkahnya meliputi penyusunan daftar pertanyaan yang relevan, identifikasi responden yang berpengetahuan, dan pelaksanaan wawancara baik secara tatap muka maupun melalui media lain, dengan mencatat atau merekam jawaban untuk analisis lebih lanjut. Teknik ini bertujuan mendapatkan data primer tentang tantangan dan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual dari perspektif pegawai yang terlibat langsung.

2. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen melibatkan pengambilan informasi dari dokumen resmi yang telah ada, seperti laporan keuangan, pedoman akuntansi, dan peraturan pemerintah terkait. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi dokumen yang relevan, akses dokumen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur atau sumber resmi lainnya, serta analisis isi dokumen untuk mendapatkan informasi terkait penerapan akuntansi berbasis akrual. Teknik ini bertujuan memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis penerapan akuntansi berbasis akrual.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan Dokumentasi. Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021:162) dalam melakukan analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus, serta terdapat 3 alur yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Selain itu, reduksi data merupakan sebuah proses berpikir yang sensitif sehingga diperlukan kecerdasan, kekeluasan dan kedalaman wawasan sehubungan dengan hal yang diteliti.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara merangkum hasil wawancara sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual serta memilah data laporan keuangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur yang masuk dalam kategori PP No. 71 Tahun 2010 yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menampilkan data dengan cara ini memudahkan pemahaman mengenai apa yang terjadi dan membantu merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Pada penelitian ini penyajian data disusun dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan utama dari penelitian. Peneliti menyajikan hasil analisis dengan cara yang sistematis, mencakup deskripsi tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya serta laporan keuangan yang termasuk dalam kategori PP No. 71 Tahun 2010.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang ingin diteliti, sehingga setelah diteliti menjadi lebih terang. Dalam melakukan penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang telah diambil bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti pendukung yang valid. Namun, apabila kesimpulan awal yang telah diambil didukung oleh bukti pendukung yang valid maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel.

Pada penelitian ini penerikan kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Sumba Timur, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur informasi dan sistem informasi serta komitmen manajemen. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Berikut ini adalah profil singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur:

1. Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.
2. Alamat Kantor : Jl. L. D. Dapawolw no.14b Waingapu
3. Telepon : (0387) 61414
4. Faximile : (0387) 61414
5. Email : kabsumbatimur@kemenag.go.id
6. Kode Pos : 62620

B. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Departemen Agama Republik Indonesia secara resmi dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, setahun setelah Indonesia merdeka dengan adanya Penetapan Perintah No. 1/SD Tahun 1946. Adapun susunan organisasi Departemen Agama pertama kali disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 185/KJ Tahun 1946. Sementara itu, struktur organisasi instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat daerah awal mulai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 yang terdiri dari beberapa unit, antarlain: Kantor Kepenghuluan Kewedanaan, Kantor Kenabian Kecamatan, Kantor Inspeksi Pendidikan Tingkat Provinsi, dan Kabupaten.

Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) daerah Sumba dimulai pada tanggal 20 Maret 1951, yang berlokasi di Kota Waingapu dan bertugas melayani seluruh wilayah pulau Sumba. Pada Tahun 1973, kantor tersebut mengalami perubahan status menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Sumba Timur dengan Sumba Barat menjadi salah satu Kantor Urusan Agama (KUA). Kepala Urusan Agama (KUA) Sumba Timur dipimpin oleh L. H. Madi (Yang diakui juga sebagai Kepala Kantor yang pertama dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat).

Pada tahun 1974 terjadi pemekaran administratif wilayah pulau Sumba menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat (seluas 4.587 KM²). Sehubungan dengan adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Sumba Timur yang melayani Kantor Urusan Agama Sumba Barat maka Pemerintah mengangkat Bapak Laurensius Nani Boeloe, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintahan Daerah Sumba Barat, menjadi Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Sumba Barat. Akan tetapi tidak lama berselang sesuai dengan pembagian wilayah kerja antara Sumba Timur dan Sumba Barat, maka terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Perwakilan Sumba Barat menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumba Barat. Maka dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3-d/4103/1975 tanggal 3 Nopember 1975 menetapkan Bapak Laurensius Nani Boeloe menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumba Barat.

Pada tahun 2009 Departemen Agama mengalami perubahan nama dari Departemen menjadi Kementerian Agama. Maka Kantor Departemen Agama di seluruh Indonesia berubah nama termasuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumba Timur, yang ikut berubah nama menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Pada tahun ini juga, selain Kantor Satuan Kerja (Satker) Induk Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur juga berdiri beberapa Satker pendukung, yaitu KUA Kecamatan dan Madrasah yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sumba Timur.

Maka sampai saat ini Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur juga telah berdiri pula 8 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur, yaitu:

1. KUA Kec. Pandawai
2. KUA Kec. Kota Waingapu
3. KUA Kec. Lewa
4. KUA Kec. Umalulu
5. KUA Kec. Rindi
6. KUA Kec. Pahunga Lodu
7. KUA Kec. Paberiwai
8. KUA Kec. Tabundung

Disamping KUA Kecamatan, juga berdiri madrasah, baik Madrasah Negeri maupun Swasta, yaitu MAS Waingapu, MTsN Kamalaputi, MTs Swasta Istiqamah Melolo, MIN Kamalaputi, MIN Melolo, MIS Waingapu, MIS Maujawa, MIS Lewa, MIS Al-Jihad Pahunga Lodu dan MIS Tanaraing.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur memiliki dua tugas dan fungsi yaitu, melayani urusan agama dan urusan pendidikan agama serta bidang keagamaan. Khusus untuk urusan agama melayani semua umat beragama yang tergambar pada table di bawah ini:

Tabel 4. Data Umat Beragama Kabupaten Sumba Timur

NO	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Aliran Kepercayaan
1.	KotaWaingapu	11.792	18.211	5.074	231	16	-	1.689
2.	Haharu	69	5.168	432	-	-	-	1.482
3.	Lewa	809	14.921	1.681	4	-	-	244
4.	Ngaha Ori Angu	10	9.724	775	10	-	-	582
5.	Tabundung	12	9.699	234	-	-	-	355
6.	Pinu Pahar	1	8.056	22	-	-	-	24
7.	Pandawai	250	16.048	2.500	17	-	-	1.092
8.	Umalulu	943	14.787	1.073	14	1	3	3.459
9.	Rindi	997	6.990	247	6	-	-	3.116
10.	Pahunga Lodu	564	12.506	1.656	6	1	-	331
11.	Wula Waijelu	52	7.013	1.769	-	-	-	52
12.	Paberiwai	8	6.813	82	-	-	-	147
13.	Karera	702	7.733	442	-	-	-	42
14.	Kahaungu Eti	24	8.668	656	9	-	-	1.078
15.	Matawai La Pawu	5	7.014	45	-	-	-	26
16.	Kambara	806	30.871	4.288	118	3	-	157
17.	Kambata Mapambuhang	6	4.109	167	-	-	-	197
18.	Lewa Tidahu	20	7.821	351	-	-	-	21
19.	Katala Hamu Lingu	9	3.868	116	-	-	-	635
20.	Kanatang	322	7.795	2.917	17	-	-	1.331
21.	Ngadu Ngala	5	5.918	701	-	-	-	61
22.	Mahu	12	3.575	851	-	-	-	718
	Jumlah	17.418	216.498	26.079	432	21	3	16.839

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur

C. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba

Timur

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama.

1. Visi

Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

3. Tujuan

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama telah menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

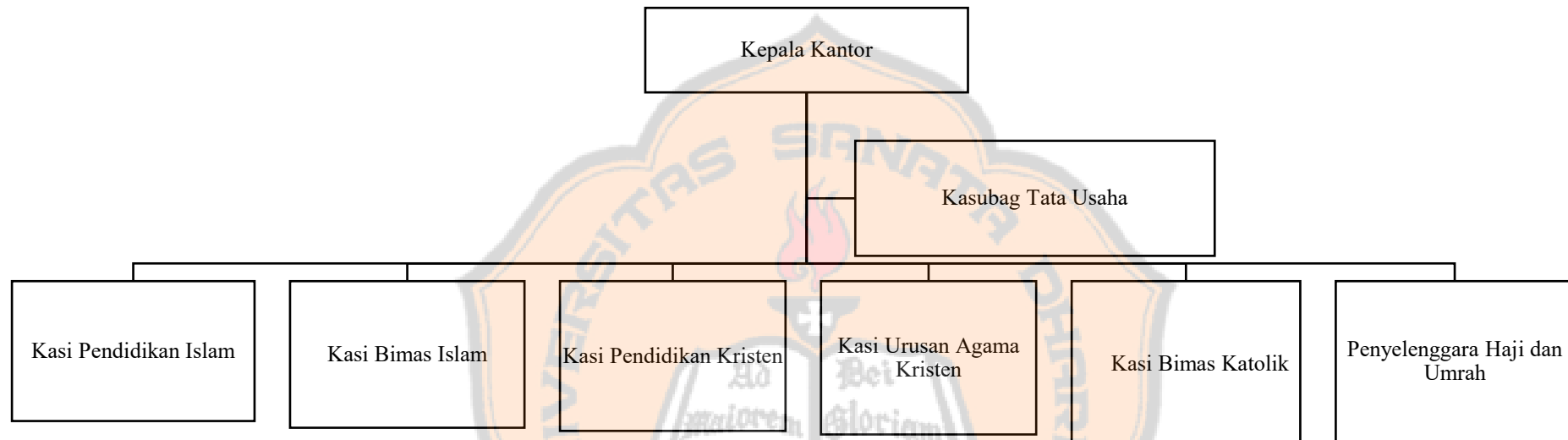
- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah.

- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan.
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
- e. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.
- f. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Sebagai upaya untuk memudahkan pengawasan terhadap setiap bagian satuan kerja pada sebuah instansi maka perlu adanya struktur organisasi yang jelas. Menurut Imam Wahjono (2022) struktur organisasi adalah sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individu dan kelompok.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu instansi dibawah naungan pemerintah sudah selayaknya untuk menerapkan adanya struktur organisasi yang jelas. Sesuai PMA No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Instansi Kementerian Agama maka susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, antara lain:



Gambar I. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Emiliana Yegho, S.S	Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2.	Huki Yeanri Oktovianus Wila Hida, S.Pd, M.M	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
3.	Drs. Suaeb	Kepala Seksi Pendidikan Islam	Institut Agama Islam Negeri Alauddin
4.	Ernawati Saputri, S.Pd	Pengawas Sekolah Ahli Madya SLTP/SLTA/MTs/MA	IKIP PGRI Surabaya
5.	Dorce Manno Bani, S.Pd., M.Pd	Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI	STAK Negeri Kupang
6.	Dorkas Bela Wine, S.Th	Guru Ahli Madya / Kepala Sekolah	Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta
7.	Lika Tehu, S.Pd	Pengawas Sekolah Ahli Madya TK/RA/SD/MI	Universitas Kristen Ar Wacana Kupang
8.	Nurwahidah, S.Ag	Penyuluh Agama Ahli Madya KUA Kec. Kota Waingapu	IAIN
9.	Harun Ali, S.Pd.I	Guru Ahli Madya / Kepala MIN 1 Sumba Timur	IAIN Mataram
10.	Zainab, S.Ag	Guru Madya Bidang Studi Bahasa Arab	IAIN Alauddin
11.	Siti Aminah, S.Pd	Guru Ahli Madya / Kepala MIN 3 Sumba Timur	Institut Keguruan Ilmu Pendidikan PG Surabaya
12.	Etni Alon Lopo, S.Pd	Guru Ahli Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen	PAK
13.	Alfian Haji Dahlan, S.Ag	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Universitas Muhamadiyah Surabaya
14.	Sofia Bida, S.Ag	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI	STIPAR ENDE
15.	Martinus Tai Ngunjunuha, S.Th., M.Pd.	Kepala Seksi pada Seksi Urusan Agama Kristen	STAK Negeri Kupang
16.	Elisabeth Lince Marambatana, S.Pd	Guru Ahli Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen	Universitas Kristen Wacana
17.	Lasarus Wandu, S.Ag	Guru Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik	Sekolah Tinggi Pas Keuskupan Agung Kupang
18.	Yuliana Rambu Day Atahawu, S.Th., M.Pd.	Guru Ahli Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen	STAK Negeri Kupang
19.	Marlina Nggiri, S.Th	Guru Ahli Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta
20.	Hau Tanggumara, S.Pd	Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Tata Usaha	Universitas Sanata Dharma
21.	Achmad Abdurahman, S.Ag	Penyelenggara Haji dan Umrah	IAIN
22.	Yohanis Tunggu Etu, S.Th., M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Kristen	STAK Negeri Kupang
23.	Katrina Maramba Mila, S.Th	Guru Ahli Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen SLTP Negeri	STAK Marturia Yogyakarta

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan
24.	Lende Tara, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri Mandas	STAK Marturia Yogyakarta
25.	Marzelina Radandima, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDM Lumbumengggit	Sekolah Agama Kristen Marturia Yogyakarta
26.	Julaiha Syukur, S.Sos.I	Guru Muda Bidang Studi BP/Konseling	S1
27.	Kahotu Tamar, S.Th., M.Pd.	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Swasta	STAK Negeri Kupang
28.	Petronela Rely, S.Ag	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SDI Tamanu	Sekolah Tinggi Pastor Keuskupan Agung Ku
29.	Maria Lali Mere, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	STAK Marturia Yogyakarta
30.	Maria Bernadeta Yaku Ata, S.Ag.	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SMP Negeri 2 Waingapu	Sekolah Tinggi Pas Keuskupan Agung Kupang
31.	Matias Baghe Ngongo, S.Ag	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SLTP Negeri	Sekolah Tinggi Pas Keuskupan Agung Kupang
32.	Petronela Mala, S.Ag	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri	STPK
33.	Chatrina Kuji Djara, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SLTP Negeri	STAK Marturia Yogyakarta
34.	Ahmad, S.H	Penghulu Ahli Muda/Kepala pada KUA Kec. Kota Waingapu	STIH
35.	Mohamad Sidin, S.HI	Penghulu Ahli Muda/Kepala KUA Kec. Lewa	Universitas Muhamadiyah Kupang
36.	Mariana Nguru Kadja, S.Th	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SMP TK Hanggaroru	STAK Marturia Yogyakarta
37.	Jatu Parwati, S.Pd.Si	Pelaksana Analis Pengembangan SDM Aparatur pada Sub Bagian Tata Usaha	Universitas Negeri Yogyakarta
38.	Peternich Werenfriedus Frits Djae, S.T	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik	Universitas Warmadewa Denpasar
39.	Marlin Carolyn Lobo, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sub Bagian Tata Usaha	Universitas Stikubank Semarang
40.	Joka Pati, S.Th	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Seksi Pendidikan Kristen	STAK Marturia Yogyakarta

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
41.	Buhari, S.Pd.I	Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) pada MTsN Sumba Timur	IAIN MATARAM
42.	Fitriyah Roswati, S.Pd.I	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam pada SD Negeri	Universitas Islam Malang
43.	Soleman Neonane, S.Pd.K	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	STT GKS Pameti Karata
44.	Nona Maramba Lodji, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDM Payeti 1	STAK Marturia Yogyakarta
45.	Rambu Jola Kalunga, S.Pd.K.	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDM Praiwora	STAK Negeri Kupang
46.	Mustamal, S.Pd.I	Guru Ahli Muda / Kepala MTsN Sumba Timur	IAIN Hamzanwandi Lombok Timur
47.	Agustina Lopi, S.Pd.K.	Guru Ahli Muda pada SD Masehi Melolo 1	STT Gereja Kristen Sumba
48.	Bernadete Je, S.Ag.	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SDN Waingapu 1	Sekolah Tlinggi Keuskupan Agung Kupang
49.	Yuliana Kahotu Tamar	Guru Ahli Muda pada SD Negeri	STAK Marturia Yogyakarta
50.	Salomina Karolina Kopa Come, S.Pd	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	Universitas Kristen Wira Wacana
51.	Katharina Pea, S.Ag	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri	Sekolah Tlinggi Keuskupan Agung Kupang
52.	Samsidah	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada RA/BA	PGAN Bima
53.	Wenynyi Djami Huki, S.Th	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDI Tanaraing	STAK Marturia Yogyakarta
54.	Noldy Junintje Beldina Weto, S.PdK	Guru Ahli Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDI Papindung	STT GKS Lewa
55.	Made Wirya Angkasa, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Hindu pada SLTP Negeri	STKIP Agama Hindu Singaraja
56.	Ibrahim Hamid	Pengadministrasi Persuratan pada Urusan Tata Usaha MIN 1 Sumba Timur	MAN Ende
57.	Tersiana Laki Kari, S.PdK	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	STT GKS Lewa

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
58.	Margaretha Koni, A.Md., S.Pd.	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDI Palindi Mburung	STT Gereja Kristen Sumba
59.	Tasnim, S.Pd.	Guru Ahli Pertama / Kepala pada MIN 2 Sumba Timur	IAIN Mataram
60.	Nona May Kamunggu	Pengadministrasi Umum KUA Kec. Kota Waingapu	MAN
61.	Belandina Tamelab	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	PGAKP SOE
62.	Umbu Erfa, SE	Guru Ahli Pertama pada MIN 2 Sumba Timur	Universitas Muhamadiyah Malang
63.	Jared Blegur, S.Pd.	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba
64.	Godfrid Demidrius A Tobe, A.Md	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SMAN 1 Haharu	Universitas Kristen Wacana Salatiga
65.	Yusli Katarina Selay, S.PAK	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri	STT GKS LEWA
66.	Kharismawati Permono, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Matematika pada MTsN Sumba Timur	Universitas Nusa Cendana
67.	Tomidin Umar, S.HI	Penghulu Ahli Pertama/Kepala KUA Kec. Rindi	Institut Agama Islam Hamzanwadi Lombok Timur
68.	Dewi Fatimah, S.Pd.I	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Islam pada MTsN Sumba Timur	IAIN Surakarta
69.	Nawal Ali Habsyi, S.Pd.I	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Islam pada MIN 2 Sumba Timur	Universitas Islam Malang
70.	Marthen Selan, S.Pd.K	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri Rapamanu	IKIP Mataram
71.	Juliana Robo	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Masehi Kambaniru 2	PGA Kristen
72.	Junaidin, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Matematika pada MTsN Sumba Timur	IKIP Mataram
73.	Murtiyana Maharani, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MIN 3 Sumba Timur	Universitas Flores
74.	Ahyar Abdul Muthalib, S.Pd.I	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Akidah Akhlaq pada MTsS dilingkungan	INSTITUT AGAMA ISL NEGERI MATARAM

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
75.	Florianus Marung, S.Fil	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik	Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
76.	Robertus Sawu Acong, S.Fil	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Kelompok Jabatan Fungsional	Universitas Widya Mandira Kupang
77.	Anthonia Fao, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDI Hangaroru Kec. Rindi	STAK Negeri Kupang
78.	Adonia Selfina Nau, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SDI Maujawa	STAK Negeri Kupang
79.	Sarci Paulina Taopan, S.Pd.K	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri Walakari	STAK Negeri Kupang
80.	Marwati, S.Pd.I	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	IAIN Mataram
81.	Hory Ermonika Mella, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen SD Negeri	STAK Negeri Kupang
82.	Darius Tati, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen SD Negeri	STAK Negeri Kupang
83.	Domingus Mbelu, S.Pd.K	Analisis Lembaga Keagamaan pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba
84.	Robinson Mbelu, SE	Analisis Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
85.	Lia Safitri, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	Universitas Nusa Cendana
86.	Sri Aisyah, S.Pd. SD	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Terbuka
87.	Ridwan, S.Pd.I	Guru Bidang Studi Bahasa Arab MTsN Sumba Timur	UIN Mataram
88.	Badrudin, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Matematika pada MIN 2 Sumba Timur	IKIP Mataram
89.	Indri Hastuti, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Muhammadiyah Kupang
90.	Nur Afni Thalib, S.Pd.SD	Guru Kelas pada MIN 3 Kantor Kementerian Agama	Universitas Terbuka
91.	Abdul Malik, S.Hum	Guru Bidang Studi Bahasa Arab MIN 1 Sumba Timur	Universitas Islam Negeri Alauddin
92.	Hamida, S.Pd	Guru Bidang Studi Bahasa Inggris MIN 1 Sumba Timur	Universitas Islam Malang

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
93.	Vivi Shinta Suci, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Matematika pada MTsN Sumba Timur	Universitas Muhammadiyah Surakarta
94.	Puji Rahayu, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bahasa Indonesia pada MTsN Sumba Timur	Prajabatan 2023
95.	Maryam, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MIN 3 Sumba Timur	Universitas Terbuka
96.	Ariyanti Siu, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MIN 3 Sumba Timur	Universitas Terbuka
97.	Alwiah Binti Abubakar Algadri, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bahasa Indonesia pada MTsN Sumba Timur	Prajabatan 2023
98.	Habibah, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MIN 2 Sumba Timur	Universitas Islam Negeri Alauddin
99.	Rohimawati Daeng Matakko, S.Pd	Ahli Pertama - Guru Kelas pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Flores
100.	Laila Karmila Thalib, S.S	Guru Bidang Studi Bahasa Inggris pada MTsN Sumba Timur	Prajabatan 2023
101.	Yosefina Hadidja Rina, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MTsN Sumba Timur	Universitas Terbuka
102.	Salbia Ishaq, S.Sy	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada KUA Kec. Kota Waingapu	Universitas Muhammadiyah Kupang / UMK
103.	Untung Prasatija, S.HI	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada KUA Kec. Pandawai	Institut Agama Islam Hamzanwadi Nadhlat Wathan
104.	Aksa Rosina Ome, S.Th	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Teolog Magelang
105.	Mersiana Rundi	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Teologi Baptis Independen Purworejo
106.	Yulita Tamo Ina Bili	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik	Sekolah Tinggi Pastor Keuskupan Agung Kupang
107.	Febe Apriani Dubu	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Teolog Bethel Indonesia
108.	Maria Magdalena Djami	Penyuluh Agama Ahli Pertama Mata Kuliah Teologi Al Kitab dan Pembinaan Teologi Sistematis	Sekolah Tinggi Teologi Indonesia
109.	Yohana Tri Wahyuni	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar
110.	Markus Solo Lein	Penyuluh Agama Ahli Pertama Mata Kuliah Filsafat Agama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
111.	Wilhelmus Leksi Kodu	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik	Universitas Sanata Dharma
112.	Artha Sasta R. Radja Uly, S.Si., Teologi	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Universitas Kristen Satya Wacana
113.	Kasince Yiwa	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur	Universitas Kristen Arta Wacana
114.	Rut Rambu Doru, S.Th	Penyuluh Agama Ahli Pertama pada Seksi Urusan Agama Kristen	Sekolah Tinggi Teologi Indonesia
115.	Hidayah Tullah, S.Sos	Penghulu Ahli Pertama pada KUA Kec. Paberiwai	Universitas Islam Negeri Mataram
116.	Syahrul Yusuf, S.H	Penghulu Ahli Pertama pada KUA Kec. Pahungalodu	Universitas Hasyim Ari Tebuireng Jombang
117.	Fadhil Al-Jamali RM. Idris, S.HI	Penghulu Ahli Pertama pada KUA Kec. Umalulu	Universitas Islam Negeri Alauddin
118.	Alfonsius Ligori Tamar, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
119.	Muhammad Ajuri, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada MIN 2 Sumba Timur	Universitas Nusa Cendana
120.	Irfan Putra, S.Pd	Guru Bidang Studi Matematika pada MTsN Sumba Timur	IAIN Mataram
121.	Yosefina Hadidja Rina, S.Pd	Guru Ahli Pertama pada MTsN Sumba Timur	Universitas Terbuka
122.	Siti Donumo, S.HI	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Akidah Akhlaq pada MTsN Sumba Timur	IAIN Mataram
123.	Arham Fatima Ali, S.Pd	Guru Ahli Pertama Bidang Studi Bimbingan dan Konseling pada MTsN Sumba Timur	Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IK Mataram
124.	Maria Astiani Tagu Hana Gaina, S.AB	Perencana Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	Universitas Nusa Cen Kupang
125.	Salo Gracia Elise Logo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	Universitas Merdeka Malang
126.	Siti Fatmawati Abdullah, S.Pd.SD	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Terbuka
127.	Fatimah Pardjan, S.Pd.SD	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Terbuka
128.	Rosida, S.Pd.SD	Guru Ahli Pertama pada MIN 1 Sumba Timur	Universitas Terbuka

Tabel 5. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur (Lanjutan)

129.	Saud H. Salem	Pengadministrasi Keuangan pada MIN 1 Sumba Timur	Sekolah Tinggi Agama Islam
130.	Abdullah Assegaf, S.AP	Analisis Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) pada Seksi Pendidikan Islam	Universitas Terbuka
131.	Teguh Iman Suwagyo	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sub Bagian Tata Usaha	SMA Negeri Waingapu
132.	Ruidah Ahmad Nani	Pengadministrasi pada MIN 2 Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur
133.	Faht Faisal	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	SMA Swasta Muhammadiyah
134.	Hamzah Usman	Pengadministrasi Keuangan pada MIN 3 Sumba Timur	SMA Negeri Sumba Timur
135.	Nur Hidayah	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama	SMA Negeri Waingapu
136	Akbar Djawa	Pengadministrasi Umum pada Urusan Tata Usaha MTsN Sumba Timur	PGAN

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Model penelitian yang digunakan pada penelitian mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1984), dimana terdapat tiga tahap utama dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam melakukan analisis data yang bertujuan untuk merangkum informasi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Dalam mereduksi data hal utama yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi faktor kunci. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): kompetensi pegawai dalam memahami dan menerapkan akuntansi berbasis akrual masih bervariasi.
- b. Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi: Kualitas jaringan yang kurang stabil menjadi kendala utama dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

- c. Komitmen Manajemen: dukungan Pimpinan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi dari semua unsur pimpinan.

2. Penyajian Data

Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam instansi pemerintahan merupakan sebuah bentuk reformasi sistem keuangan negara yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sistem akrual dianggap mampu menggambarkan kondisi keuangan yang riil dan komprehensif karena mencatat seluruh transaksi pada saat terjadinya, bukan pada saat kas berpindah. Hal ini sejalan dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang menekankan akuntabilitas dan efisiensi kinerja sektor publik (Elsye dkk., 2016).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur menyampaikan bahwa tujuan utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi.

“Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab atau akuntabel”.

Pernyataan ini, menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi sebuah komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi sebuah cerminan akan kesadaran mengenai pentingnya

pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pada tiap instansi pemerintahan.

Selain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat dan *real-time*. Dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi pada saat peristiwa terjadinya, akuntansi berbasis akrual dapat mengurangi terjadinya distorsi data yang sering muncul pada akuntansi berbasis kas. Kelengkapan dan akurasi data laporan keuangan yang disusun menggunakan sistem akuntansi akrual dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan memonitor efektivitas program pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kantor yang menyatakan bahwa:

“Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual ini di Kementerian Agama itu ada beberapa yang pertama menghitung biaya pelayanan publik secara akurat dan rasional, menyajikan data yang akurat untuk mengukur kinerja pemerintah dan juga menghasilkan informasi akuntansi yang lebih lengkap dan menyeluruh”.

Meskipun dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat yang signifikan pada laporan keuangan, Kepala Kantor juga menyadari bahwa terdapat tantangan yang memengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, khususnya dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Beliau menyoroti bahwa masih terdapat pegawai yang pendidikannya bukan berasal dari disiplin bidang ekonomi atau akuntansi.

Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penguasaan teknis akuntansi berbasis akrual yang cukup kompleks.

Adanya keterbatasan terkait dengan kompetensi SDM dapat berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang disajikan. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, pegawai cenderung kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP berbasis akrual. Akibatnya laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan tidak lengkap, yang pada akhirnya dapat mengurangi akuntabilitas dan efektivitas dari laporan keuangan. Hal sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kantor yang menyatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang ketersediaan sumber daya manusia itu itu memang sangat penting, sangat penting dalam mengelola keuangan tetapi memang secara kualifikasi pendidikan itu dia tidak spesifik di Kementerian agama ini banyak yang S.Th, S.Pd, S.Ag kalau yang sosial ekonomi akuntansi itu memang sangat sedikit memang terbatas”.

Menyadari akan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai. Upaya yang dilakukan yaitu melalui program pelatihan dan forum diskusi mengenai pengelolaan anggaran, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis akuntansi berbasis akrual di kalangan pegawai. Dengan demikian, pegawai yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang sesuai dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga implementasi sistem akuntansi akrual dapat

berjalan dengan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi instansi pemerintah.

“Dengan adanya kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai ini kita melakukan pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu kita melakukan diklat atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pelaksanaan penganggaran di Sumba Timur ini”.

Selain itu, untuk semakin menunjang keberhasilan penerapan akuntansi akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dukungan manajemen menjadi salah satu aspek krusial yang sangat berperan penting. Melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap sesuai dengan peruntukannya, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan program kerja. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan target kinerja tercapai secara efisien. Evaluasi rutin memungkinkan koreksi dini atas penyimpangan dan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik:

“Kami senantiasa melakukan koordinasi dan pengawasan guna mengevaluasi capaian kinerja dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan agar anggaran yang tersedia digunakan sesuai dengan peruntukannya”.

Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual dilingkungan instansi pemerintahan, diperlukan adanya keterpaduan antar satuan kerja untuk semakin mendukung keberhasilan penerapannya dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks birokrasi, setiap satuan satuan kerja didalamnya

harus memiliki kaitan satu dengan lainnya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diketahui bahwa keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem atau aplikasi, tetapi diperlukan juga adanya efektifitas koordinasi antar satuan kerja. Setiap bagian memiliki peran penting dalam proses pencatatan dan pelaporan. Tanpa sinergi yang baik antar setiap satuan kerja, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Hal ini sejalan dengan Subhi & Yuhertiana (2021) yang menekankan pentingnya kolaborasi antar unit dan peran aktif manajemen dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintahan.

“Keberhasilan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada koordinasi yang baik antar satuan kerja dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan”.

Selain itu, menurut beliau penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kementerian Agama telah berjalan secara optimal dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam SAP yaitu relevan, andal dan akuntabel.

“Kementerian Agama hingga tahun 2023 secara konsisten memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas *review* laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan instansi pemerintah merupakan bagian dari reformasi sistem keuangan negara yang

diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran publik.

Dengan diberlakukannya standar akuntansi berbasis akrual secara nasional, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya, termasuk di tingkat kementerian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya dorongan regulasi dari pemerintah pusat sebagai bentuk reformasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan anggaran, yang bertujuan untuk semakin meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

“Sebetulnya ini berlaku sejak tahun 2015, dengan dasar hukumnya Keputusan Menteri Agama No.15 Tahun 2015 tentang penerapan standar dan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Agama”.

Beliau juga menambahkan bahwa pada praktiknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini menjadi pengganti sistem pelaporan manual dan mengintegrasikan berbagai modul keuangan seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), yang menyebutkan bahwa kesiapan perangkat sistem

informasi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual secara efektif.

“Penerapan akuntansi berbasis akrual itu kalau di sini kita dilakukan melalui aplikasi yang namanya SAKTI”.

Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintahan, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kesiapan perangkat regulasi dan teknologi, tetapi juga harus mencerminkan dampak nyata yang dihasilkan terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun. Keberhasilan tersebut dapat diukur dengan meningkatnya tingkat transparansi, akurasi, serta relevansi data yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

Penerapan sistem digital dalam pencatatan transaksi yang dilakukan secara online dan non-tunai memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih sistematis dan dapat dipantau secara *real-time*. Hal ini penting karena dengan memanfaatkan teknologi berbasis akrual, setiap transaksi dapat tercatat secara langsung pada saat terjadinya peristiwa, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan keuangan. Selain itu, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga mempercepat proses pelaporan keuangan yang meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan. Keuntungan lainnya dari penerapan sistem ini adalah tercapainya keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Sistem akuntansi berbasis akrual, yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengharuskan setiap transaksi keuangan

dicatat dengan cara yang lebih mendetail, memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, diketahui bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara non-tunai dan tercatat dalam sistem yang berbasis *online*, arus keuangan dapat dipantau secara real-time, memudahkan identifikasi ketidaksesuaian atau kesalahan yang terjadi dalam proses pelaporan. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, yang menjadi tujuan utama dalam penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tidak hanya menyempurnakan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mengarah pada terciptanya pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien dan akuntabel.

“Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan. Transparansinya itu karena saat ini kita melakukan transaksi menggunakan sistem *online* jadi semuanya non tunai, sehingga arus keuangan yang masuk dan keluar dapat terkontrol”.

Selain menyoroti mengenai dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual, beliau juga menyoroti mengenai kendala yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu ketergantungan terhadap konektivitas internet. Hal ini dikarenakan SAKTI

berbasis *online*, maka gangguan jaringan menjadi faktor penghambat dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

“Dalam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi, jaringan menjadi kendala utama yang dihadapi. Hal ini dikarenakan setiap proses pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan SAKTI berbasis *online*”.

Dalam konteks pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, penerapan teknologi informasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencatatan serta pelaporan keuangan. Salah satu bentuk implementasi teknologi yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur adalah penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan proses administrasi keuangan, tetapi juga untuk mengotomatisasi pembuatan jurnal yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Keuangan, diketahui bahwa penggunaan aplikasi SAKTI sangat membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan, karena mampu menghasilkan jurnal otomatis sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Hal ini tentunya dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Langelo dkk (2015) dan Subhi & Yuhertiana (2021) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

“Dengan menggunakan aplikasi SAKTI kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi tidak signifikan. SAKTI merupakan

sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat membuat jurnal secara otomatis (*Akrual Leader*)”.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur telah berhasil menerapkan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan mereka, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu untuk diatasi.

a. Keberhasilan Penerapan

Keberhasilan dari penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur ditandai dengan :

- 1) Meningkatnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi lebih sistematis dan tepat waktu dengan adanya aplikasi SAKTI.
- 3) Mendapat predikat terbaik terkait Evaluasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (EPA).

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi

Terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Faktor-faktor ini, antara lain:

- 1) Kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM)
- 2) Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi
- 3) Komitmen Manajemen

c. Tantangan yang Dihadapi

Untuk tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dalam menerapkan akuntansi keuangan berbasis akrual pada laporan keuangan, antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang akuntansi.
- 2) Gangguan jaringan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah, termasuk di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan sehingga

memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja instansi. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018), pendekatan akrual mampu menyajikan informasi yang lebih relevan untuk evaluasi kinerja, perencanaan anggaran dan keputusan strategis.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No.15 tahun 2015 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Peraturan ini merupakan sebuah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah mengenai reformasi pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Terjadinya peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual menandai peralihan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut:

“Sebetulnya ini berlaku sejak tahun 2015, dengan dasar hukumnya Keputusan Menteri Agama No.15 Tahun 2015 tentang penerapan standar dan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Agama”.

Penerapan ini, selain sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi sebuah komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan menjadi suatu upaya untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap instansi pemerintahan sehubungan pengelolaan

anggaran. Hal ini sebagaimana dengan yang dikatakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab atau akuntabel”.

Manfaat dari penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini sangat signifikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan efisien. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan dilakukan secara non tunai dan tercatat dalam sistem yang berbasis online, maka semua arus penggunaan anggaran dapat dimonitor secara *real-time*. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, yang menjadi tujuan utama dari SAP berbasis akrual. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan. Transparansinya itu karena saat ini kita melakukan transaksi menggunakan sistem online jadi semuanya non tunai, sehingga arus keuangan yang masuk dan keluar dapat terkontrol”.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini tentunya menjadi faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selain

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penerapan standar akuntansi berbasis akrual juga memberikan manfaat strategis dalam hal penyediaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan bersifat real-time, yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kantor:

“Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual ini di Kementerian Agama itu ada beberapa yang pertama menghitung biaya pelayanan publik secara akurat dan rasional, menyajikan data yang akurat untuk mengukur kinerja pemerintah dan juga menghasilkan informasi akuntansi yang lebih lengkap dan menyeluruh”.

Dalam menerapkan SAP berbasis akrual, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SAKTI. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi berbasis akrual itu kalau di sini kita dilakukan melalui aplikasi yang namanya SAKTI”.



Gambar II. Tampilan SAKTI

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumba Timur

SAKTI merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang

meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2022). Dengan menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur menjadi lebih akurat dan transparan serta dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Operator Keuangan, sebagai berikut:

“Dengan menggunakan aplikasi SAKTI kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi tidak signifikan. SAKTI merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat membuat jurnal secara otomatis (*Akrual Leader*)”.

Sebagai sebuah instansi pemerintahan, laporan keuangan yang disajikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur merupakan sebuah komponen penting, yang menjadi sebuah bentuk perjtanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyajian dan penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI, yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional mereka.

Semua proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKTI dilakukan secara komputerisasi, dimulai dengan melakukan proses perekaman dokumen dan membentuk jurnal transaksi, yang kemudian akan diposting kedalam buku besar dan diikthisarkan dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan aplikasi SAKTI terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

(Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.)

Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023				
URAIAN	TA 2024		% terhadap Anggaran	TA 2023 REALISASI
	ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	76	-	580.688
JUMLAH PENDAPATAN	-	76	-	580.688
BELANJA				
Belanja Pegawai	18.643.289.000	23.233.649.757	124.62	18.676.808.472
Belanja Barang	837.528.000	839.967.101	99.93	791.307.845
Belanja Modal	15.000.000	15.000.000	100.00	12.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	14.945.817.000	24.085.616.858	123.54	19.480.116.317

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumba Timur

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Tabel 7. Neraca

NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023		
URAIAN	2024	2023
ASET	-	-
ASET LANCAR	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas lainnya dan Setara Kas	-	-
Belanja dibayar Dimuka	-	-
Uang Muka Belanja	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
Piutang Perpajakan	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggsuran	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	-	-
Persediaan	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah Aset Lancar	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
ASET TETAP		
Tanah	21.014. 891.000	21.014. 891.000
Tanah Belum Diregister	-	-
Peralatan dan Mesin	815.698.571	800.698.571
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-
Gedung dan Bangunan	2.341.232.168	2.341.232.168
Gedung dan Bangunan Diregister	-	-

Tabel 8. Neraca (Lanjutan)

URAIAN	2024	2023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-
Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.810.467.646	-1.627.810.168
Aset Konsesi Jasa	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
Jumlah Aset Tetap	22.376.354.093	22.544.011.571

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Tabel 9. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	580.688
Jumlah Pendapatan	-	580.688
BEBAN		
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	23.524.293.757	18.676.808.472
Beban Persediaan	18.000.000	18.000.000
Beban Barang dan Jasa	589.161.303	624.630.742
Beban Pemeliharaan	92.044.682	14.400.000
Beban Perjalanan Dinas	137.761.116	134.277.103

Tabel 10. Laporan Operasional (Lanjutan)

URAIAN	2024	2023
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.657.476	186.498.521
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
Jumlah Beban	24.543.918.336	19.654.614.438
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	24.543.918.336	19.654.034.150
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	76	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	24.543.918.260	19.654.034.150
Pos Luar Biasa		
Pendapatan PNB	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
Surplus/Defisit – LO	24.543.918.260	19.654.034.150

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 11. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	22.544.511.571	22.079.010.092
SURPLUS/DEFISIT – LO	-24.543.918.260	19.654.034.150
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Koreksi Lain-lain	-	-
Jumlah	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	24.085.616.782	19.479.535.629
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	-458.301.478	-174.498.521
EKUITAS AKHIR	22.086.210.093	22.544.511.571

Sumber: Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Dilihat dari penyajian laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur terdapat ketidaksesuaian dengan komponen laporan keuangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Terdapat dua komponen yang tidak dilampirkan pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, yaitu laporan arus kas dan laporan sisa saldo anggaran lebih. Hal ini terjadi bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan, melainkan disebabkan oleh kebijakan teknis dan structural yang mengatur bahwa penyusunan laporan keuangan berada di bawah kewenangan unit akuntansi pusat melalui aplikasi SAKTI.

Lebih lanjut, alasan tidak disajikannya laporan arus kas dikarenakan transaksi keuangan yang dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur telah menggunakan basis akrual penuh, sehingga informasi mengenai arus kas operasional menjadi kurang relevan pada tingkat pelaporan unit kerja. Di sisi lain, laporan saldo anggaran lebih tidak disajikan karena kebijakan yang mewajibkan bahwa setiap satuan kerja untuk menyeimbangkan setiap anggaran dan realisasi, sehingga anggaran pada akhir tahun harus menunjukkan saldo nihil.

Ketidakadaan laporan arus kas dan saldo anggaran lebih bukanlah bentuk kelalaian, melainkan cerminan dari adaptasi terhadap kebijakan pelaporan yang lebih relevan dan efisien dalam konteks unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur telah mampu mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara konsisten. Keberhasilan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur ditandai dengan terdapatnya beberapa penghargaan sehubungan laporan keuangan mereka, antara lain mendapat predikat EPA terbaik di tahun 2023 dan juga meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut untuk Kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan telah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:

“Kementerian Agama hingga tahun 2023 secara konsisten memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas *review* laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Pencapaian ini, tentunya menjadi sebuah bukti nyata komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dalam menjaga akuntabilitas dari laporan keuangan yang mereka sajikan. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi bukti mengenai keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur dalam menerapkan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan mereka.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, dalam penerapannya di lapangan masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen yang telah dilakukan peneliti ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhi & Yuhertiana (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pelatihan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sangat memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kantor, juga menggarisbawahi akan hal ini:

“Kalau berbicara tentang ketersediaan sumber daya manusia itu itu memang sangat penting, sangat penting dalam mengelola keuangan tetapi memang secara kualifikasi pendidikan itu dia tidak spesifik di Kementerian agama ini banyak yang S.Th, S.Pd, S.Ag kalau yang sosial ekonomi akuntansi itu memang sangat sedikit memang terbatas”.

Keterbatasan SDM dengan kualifikasi yang sesuai dapat menjadi sebuah tantangan berarti yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur pun menyadari akan hal ini, sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Kantor, beliau mengatakan bahwa harus adanya pengembangan SDM.

“Dengan adanya kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai ini kita melakukan pengembangan sdm. Pengembangan sdm itu kita melakukan diklat atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pelaksanaan penganggaran di Sumba Timur ini”.

b. Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi

Teknologi informasi merupakan aspek penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam melakukan pencatatan

dan pelaporan keuangan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur menggunakan Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI), yang berbasis online. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran bahwa jaringan merupakan kendala utama:

“Dalam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi, jaringan menjadi kendala utama yang dihadapi. Hal ini dikarenakan setiap proses pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan SAKTI berbasis online”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Langelo dkk (2015) juga menunjukkan bahwa kesiapan teknologi informasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual. Dimana dikatakan dalam penelitian tersebut instansi dengan infrastruktur teknologi yang memadai tingkat keberhasilan dalam penerapannya menjadi lebih besar dibandingkan instansi yang masih kurang memadai atau bahkan masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik dan mendukung tercapainya transparansi serta akuntabilitas yang lebih baik.

c. Komitmen Manajemen

Dukungan manajemen menjadi salah satu hal krusial yang memengaruhi tingkat keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Komitmen manajemen dalam memastikan kelancaran pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Kantor, beliau mengatakan bahwa:

“Kami senantiasa melakukan koordinasi dan pengawasan guna mengevaluasi capaian kinerja dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan agar anggaran yang tersedia digunakan sesuai dengan peruntukannya”.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pengelolaan anggaran guna memastikan bahwa anggaran yang dimiliki digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha juga menegaskan bahwa pembagian tugas yang jelas di antara berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa selain penggunaan sistem yang tepat, faktor koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan juga memengaruhi kesuksesan implementasi akuntansi berbasis akrual.

“Keberhasilan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada koordinasi yang baik antar satuan kerja dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan”.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Budiono (2016) bahwa manajemen yang proaktif dalam mendukung implementasi standar akuntansi akan menjadi lebih cepat beradaptasi dengan adanya perubahan regulasi sehubungan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi berbasis akrual tidak hanya bergantung pada teknologi atau sistem yang digunakan, tetapi juga pada dukungan manajemen yang kuat, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Akuntansi AkruaI pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur telah dilakukan secara penuh dimulai sejak tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.15 Tahun 2015. Regulasi ini menegaskan mengenai pentingnya akuntansi akrual dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Namun dalam prakteknya, terdapat dua komponen laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang tidak disajikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur yaitu laporan arus kas dan laporan sisa saldo anggaran lebih. Hal ini bukan disebabkan oleh suatu kelalaian, hal ini dikarenakan kebijakan teknis dan struktural yang berada dibawah kewenangan pusat melalui aplikasi SAKTI. Laporan arus kas tidak disajikan karena transaksi keuangan sudah menggunakan basis akrual penuh, sehingga informasi arus kas operasional

dianggap kurang relevan di tingkat unit kerja. Sementara itu, laporan saldo anggaran lebih tidak disediakan karena kebijakan yang mengharuskan setiap satuan kerja menyeimbangkan anggaran dengan realisasi, sehingga saldo anggaran pada akhir tahun harus menunjukkan angka nihil. Ketidakhadiran kedua laporan tersebut mencerminkan adaptasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur terhadap kebijakan pelaporan yang lebih efisien dan relevan, serta menunjukkan konsistensi dalam implementasi SAP berbasis akrual.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Dalam penerapannya, terdapat beberapa faktor yang berperan signifikan dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi, serta Komitmen Organisasi. SDM menjadi faktor yang sangat krusial, hal ini dikarenakan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap akuntansi berbasis akrual sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem ini. Infrastruktur teknologi, dalam hal ini aplikasi SAKTI juga memiliki peran penting dalam mendukung otomatisasi dan akurasi pencatatan keuangan. Selain itu, komitmen manajemen dalam hal pengawasan, koordinasi, serta evaluasi berkala menjadi faktor penentu dalam memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur masih menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang akuntansi. Kurangnya tenaga profesional dalam bidang ini menjadi salah satu penghambat dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan serta dapat meningkatkan resiko kesalahan dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan Pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan agar implementasi akuntansi berbasis akrual dapat berjalan lebih optimal.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat, yakni antara bulan Desember 2024 hingga bulan Januari 2025. Hal ini berdampak pada keterbatasan pendalaman data mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, mengingat pada saat penelitian di lapangan laporan keuangan tahun 2024 yang digunakan sebagai data penelitian belum selesai diaudit dan direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara (KPPN) Sumba Timur.
2. Laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur tidak dipublikasikan melalui situs web, mengingat bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur merupakan bagian dari struktur pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang

tersedia pada situs web merupakan laporan keuangan yang mencakup laporan keseluruhan untuk setiap instansi Kementerian Agama di tingkat pusat dan provinsi, bukan laporan keuangan spesifik untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.

3. Terdapat dua komponen laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang tidak dapat disajikan pada penelitian ini. Pertama, laporan arus kas yang tidak disajikan karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual penuh, sehingga laporan arus kas tidak menjadi bagian dari laporan keuangan yang harus disajikan. Kedua, laporan saldo anggaran lebih (SAL) tidak disajikan karena, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap anggaran di akhir tahun anggaran harus nihil, dan dengan demikian tidak ada saldo anggaran lebih yang tercatat.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur

Untuk semakin meningkatkan keberhasilan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Mengadakan pelatihan mengenai pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang berkelanjutan bagi para pegawai khususnya di

bagian keuangan serta merekrut SDM yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

- b. Meningkatkan infrastruktur teknologi yang menunjang optimalisasi penggunaan aplikasi SAKTI, yang mencakup peningkatan jaringan dan peningkatan sistem untuk meminimalisir terjadinya kendala teknis yang dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik serta objek penelitian yang serupa, disarankan agar melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang agar proses pengumpulan data dapat lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga data yang didapat menjadi lebih lengkap dan Komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- BPK Perwakilan Jawa Barat. n.d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sebagai Amanat Undang-undang. <https://jabar.bpk.go.id/penerapan-standar-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual-sebagai-amanat-undang-undang/>, March 27, 2025.
- Budiono, A. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015. STIA LAN, Jakarta.
- Creswell, J. W. 2014. Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. 2022. Overview SAKTI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html>.
- Dora, S. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BKPD Kota Medan). Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. (R. Sikumbang & M. S. H. Rossu, Eds.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ervina, N., Zuhra, S., Werastuti, D. N. S., Amani, T., Agustina, P. A. A., et al. 2022. Teori Akuntansi. In S. Bahri (Ed.), . CV. Media Sains Indonesia.
- Fauzia, R. A. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Universitas Widyatama, Bandung. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4563>.
- Fitri Rahmadany, A. 2024. Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2): 195–209.
- Imam Wahjono, S. 2022. Struktur Organisasi. https://www.researchgate.net/publication/359993516_Struktur_Organisasi.

- Kusuma, R. S. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Universitas Jember, Jember.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. Jurnal EMBA, 3(1): 1.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. 2016. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sult. EMBA, Vol.4 No.1: 1392–1399.
- Ningtyas, E. P., & Widyawati, D. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No.1: 1–15.
- Nopitasari, Y. 2022, June. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrua Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Purba, R. B. 2023. Teori Akuntansi. Cv. Merdeka Kreasi Group.
- Rahayu, L., Kennedy, & Anisa, Y. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau) by. JOM FEKON, 1(2).
- Simanjuntak, B. H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1–15.
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. 2021. Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. EQUITY, 24(2): 141–156.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Campuran dan R&D. CV. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Data Narasumber

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Huki Yeanri O. Wila Hida, S.Pd., M.M	Kepala Kantor
2.	Yakobus Hau Tanggumara, S.Pd	KASUBAG
3.	Marlin Carolyn Lobo, S.E	PPK
4.	Nur Hidayah	Bendahara Pengeluaran
5.	Ghazali Sa'fii, A.Md	Operator Keuangan

Lampiran 2. Tabel Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara**Narasumber: Kepala Kantor Kemenag Sumba Timur**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur?	Baik terima kasih Kak Ary, penerapan kita di Kementerian agama sumba Timur ini terkait dengan akuntansi berbasis akrual memang kalau akuntansi berbasis akrual ini di Kementerian Agama itu sudah sejak 2015 ya jadi, akuntansi berbasis akrual ini sistem akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas. Ya, penerapan sistem ini di Kementerian Agama Sumba Timur itu bertujuan untuk meningkatkan tata Kelola keuangan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab atau akuntabel. Memang manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual ini di Kementerian Agama itu ada beberapa yang pertama menghitung biaya pelayanan publik secara akurat dan rasional, menyajikan data yang akurat untuk mengukur kinerja pemerintah dan juga menghasilkan informasi akuntansi yang lebih lengkap dan menyeluruh. Mungkin itu kalau penerapan di sumba Timur itu seperti itu.
2.	Selanjutnya saya ingin mengetahui sedikit Bapak, terkait SDM dalam hal ini para Pelaksana Teknis Pengelolaan Anggaran, apakah sudah memenuhi kompetensi yang	Iya, kalau berbicara tentang ketersediaan sumber daya manusia itu itu memang sangat penting, sangat penting dalam mengelola keuangan tetapi memang secara kualifikasi pendidikan itu dia tidak spesifik di Kementerian agama ini banyak yang S.Th, S.Pd, S.Ag kalau yang sosial

NO	Pertanyaan	Jawaban
	dibutuhkan atau bagaimana bapak?	ekonomi akuntansi itu memang sangat sedikit memang terbatas tetapi bagi Kementerian Agama Sumba Timur itu pengelola pengelola anggaran ini luar biasa jadi beberapa hal yang berkaitan dengan sdm di Sumba Timur itu dengan adanya kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai ini kita melakukan pengembangan sdm. Pengembangan sdm itu kita melakukan diklat atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang pelaksanaan penganggaran di Sumba Timur ini. Jadi memang secara kualifikasi pendidikan memang dia tidak senada dengan akuntansi dan ekonomi tetapi ya kita pemberdayaan itu pengembangan sdm itu tapi saya bilang saat ini tidak masalah karena memang teman-teman yang mengelola anggaran ini semua luar biasa.
3.	Baik Bapak yang berikutnya apa saja kiat-kiat yang lakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan satker kemenag Sumba Timur sehingga bisa menghasilkan kinerja Laporan Keuangan yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku bapak?	Kalau untuk kiat-kiat yang kita lakukan di sumba Timur ini yang pertama itu menyusun dokumen perencanaan, menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada rencana strategis dari Kementerian agama terus menyusun strategi pencapaian kinerja di awal tahun anggaran jadi awal tahun anggaran itu kita susun itu RKT kita susun, RPD itu rencana Pendidikan dana dan juga jadwal kegiatan jadi berdasarkan dokumen perencanaan yang sudah disusun sejak awal yang berikut meningkatkan koordinasi antara unit terkait, unit ini terkait dengan keuangan kita melakukan koordinasi terus melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala mengintegrasikan teknologi informasi dan pengelolaan anggaran melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, terhadap penggunaan anggaran menjamin penggunaan anggaran yang lebih efektif dari efisien dan menjamin penggunaan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya jadi anggaran untuk apa

NO	Pertanyaan	Jawaban
		kita eksekusinya untuk itu. Jadi, mungkin itu untuk kiat-kiat yang kita lakukan di Sumba Timur.
4.	Yang terakhir Bapak sejauh pengamatan dan pengalaman bapak selama ini apa dampak positif dan negatif penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan anggaran di Kemenag Sumba Timur?	Kalau bicara tentang dampak positif itu yang pertama meningkatkan transparansi fiskal pemerintah itu terus memberikan informasi yang akurat untuk tujuan pertanggung jawaban pemerintah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan juga menyajikan informasi keuangan yang lebih informatif dan membantu mengukur kinerja pemerintah itu dia punya dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya tentangnya itu yaitu penerapan keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum memadai dan berbagai hal khususnya di SDM itu kita belum memiliki sdm yang kualifikasi pendidikannya setara dengan pengelolaan keuangan yang berbasis ekonomi akuntansi tetapi itu juga bukan tantangan yang berat atau dampak negatif yang berarti karena memang walaupun mereka kualifikasi pendidikannya itu berbeda tetapi mereka mengelola keuangan itu dengan baik sesuai dengan regulasi peraturan yang terupdate yang baru.

Narasumber: Kepala Sub bagian Tata Usaha

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak sebagai Penanggung Jawab Administrasi di Kantor Kemenag Sumba Timur bagaimana Bapak membagi tugas kepada staf khususnya staf yang menangani pengelola anggaran/keuangan sesuai kompetensi yang dimiliki?	Baik terima kasih adik Ary, terkait dengan pembagian tugas di Sekretariat tentu disesuaikan dengan jumlah ketenagaan yang ada khusus di bagian keuangan staf yang bekerja di keuangan sesuai dengan bidang tugas itu terbagi habis untuk seluruh tugas dan tanggung jawab yang tentu saja eh secara struktur itu eh apa yang menjadi tanggung jawab dari bapak kepala kantor, Saya dan selanjutnya kepada staf. Kami membagi tugas secara seimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pegawai dan juga

No.	Pertanyaan	Jawaban
		disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan dari setiap pegawai yang ada di kantor kami khususnya di bagian pengelola anggaran atau keuangan di kantor Kemenag Sumba Timur seperti itu.
2.	Bapak saya minta sedikit memberikan gambaran mengenai alur pengelola administrasi keuangan yang ada di kantor ini?	Iya, kalau berkaitan dengan pengelola anggaran atau keuangan di kantor Kementerian Agama Sumba Timur mulai dari bapak pimpinan selaku KPA lalu selanjutnya saya Kasubag selaku PPSPM dan selanjutnya ada PPK, lalu ada bendahara pengeluaran atau BP dan juga ada operator keuangan dan yang terakhir yang berikut itu terkait dengan pejabat pengelola administrasi belanja pegawai atau PPABP dan yang paling terakhir itu pengelola SAI atau BMN itu pengelola anggaran yang ada di kantor Kementerian Agama Sumba Timur tentu saja sesuai dengan jabatan pengelola anggaran ini juga dengan sendirinya terbagi habis tugas tanggung jawab masing-masing. Kalau bapak kepala kantor selaku KPA beliau bertanggung jawab secara penuh, seluruh pengelola anggaran di kantor Kementerian Agama ini baik itu dari sisi kebijakan maupun juga dari seluruh pertanggung jawaban anggaran yang ada di kantor. Yang tadi yang saya sudah sampaikan dari sisi pembagian tugas itu terbagi habis pada semua pegawai yang ada sedangkan yang berikut saya selaku Kasubag Tata Usaha itu bertanggung jawab sebagai PPSPM pejabat yang bertanggung jawab dengan pencairan anggaran khusus pencairan anggaran seluruh satker yang ada di Kemenag Sumba Timur ini, berkaitan dengan pencarian anggaran itu menjadi tanggung jawab saya. Sedangkan yang berikut PPK, PPK ini semua unit seksi di Kemenag Sumba Timur memiliki PPK-nya masing-masing dan khusus untuk di sekjen juga ada yang nanti adik akan bertemu juga dan PPK ini bertanggung

No.	Pertanyaan	Jawaban
		jawab terhadap tindakan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran yang ada, mulai dari perencanaan bagaimana lalu pelaksanaannya bagaimana dan juga pengarsipannya dan pada akhirnya juga pelaporan keuangan secara berkala baik itu triwulan eh bulanan, triwulan , dan juga semester dan tahunan. Sedangkan yang berikut bendahara pengeluaran atau BP itu juga di setiap unit ada dan BP ini bertanggung jawab berkaitan dengan seluruh penataan perusahaan menyangkut pengelolaan anggaran yang ada ya bendahara selain bertanggung jawab untuk membelanjakan anggaran juga bertanggung jawab untuk dokumentasi seluruh belanja pegawai yang ada dan juga melaporkan secara baik sesuai dengan administrasi belanja pegawai baik itu mulai dari nota belanja, kwitansi dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasinya dan pada akhirnya juga melaksanakan pelaporan secara berkala dan di samping bendahara pengeluaran juga ada operator keuangan yang bertanggung jawab terkait dengan seluruh proses secara administrasi secara aplikasi berkaitan dengan belanja anggaran yang ada di Kemenag Sumba Timur sehingga semua yang terkait dengan proses belanja dan juga persiapan dokumen untuk pencairan, dokumentasi belanja dan juga pada persiapan dokumen pelaporan itu menjadi tanggung jawab dari operator keuangan. Pejabat pengelola anggaran yang berikut itu PPABP ini adalah satu pejabat yang bertanggung jawab dengan belanja pegawai terkait dengan kesejahteraan pegawai ini tentu anggaran yang tersedia juga tersedia berupa gaji, tunjangan dan juga uang makan ya sehingga setiap bulan itu dilakukan pencairan kesejahteraan pegawai ini baik

No.	Pertanyaan	Jawaban
		gaji, eh induk dan juga eh, tunjangan kinerja, dan uang makan itu secara rutin eh diatur oleh PPABP atau pejabat pengelola administrasi belanja pegawai dan yang terakhir adalah pejabat pengelola SAI BMN ini salah satu pejabat yang bertanggung jawab dengan seluruh pengarsipan, administrasi belanja pegawai mengarsipkan itu SPM, SSB yang sudah diajukan dan juga seluruh kwitansi dan seluruh laporan keuangan yang ada itu yang mengelola pengarsipannya itu oleh pengelola SAI. Tanggung jawab yang berikut oleh pejabat pengelola SAI ini juga adalah menyangkut BMN seluruh dokumen BMN itu diarsipkan secara baik ditata secara baik oleh pengelola SAI. Seluruh pengelola anggaran mulai dari KPA sampai dengan pejabat pengelola SAI tadi tentu ini menjadi tim kerja di Kemenag Sumba Timur yang berkaitan dengan seluruh proses pengelolaan anggaran yang ada di Kemenag Sumba Timur
3.	Apakah penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada pengelolaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kemenag Sumba Timur telah berjalan secara optimal?	Iya, untuk pengelolaan anggaran di Kemenag Sumba Timur dengan sistem akuntansi berbasis akrual sudah berjalan secara baik maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 bahwa pemerintah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk Kementerian agama itu menggunakan sistem akuntansi atau standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, namun demikian untuk Kementerian Agama khususnya itu baru diterapkan mulai 2015 dengan keluarnya KMA nomor 15 tahun 2015 dimana seluruh satker Kementerian dimanapun di seluruh Indonesia termasuk Kementerian Agama sumba Timur, itu wajib dalam seluruh pengelolaan anggaran itu menggunakan standar akuntansi berbasis akrual maka kami di Kemenag Sumba

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Timor tentu mempunyai kewajiban yang sama dan punya kewajiban yang berjenjang untuk wajib juga untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini dan sudah berjalan secara baik dan ya khusus untuk di Kementerian Agama ya hingga tahun 2023 itu secara terus-menerus telah memperoleh penghargaan dari Kementerian keuangan atas review laporan keuangan itu dengan predikat WTP ini untuk Kementerian Agama keseluruhan khusus untuk di Kementerian agama Kabupaten Sumba Timur untuk 2023 ya kami mendapat juga EPA terbaik sehingga itu menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan negara di Kementerian Agama sumba Timur dengan menggunakan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual ini sudah berjalan baik dan mudah-mudahan ya ke depan akan lebih baik lagi. Khusus untuk 2024 ini kami baru menyiapkan seluruh laporan pelaksanaan anggaran dan melakukan rekon dengan KPPN namun hasilnya belum kami mendapatkan review dari biro keuangan ataupun dari Kementerian keuangan sehingga dengan demikian kami juga berharap ya tahun ini akan juga lebih baik dari tahun sebelumnya seperti itu adik Ary.

Narasumber: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ibu saya ingin sedikit mengetahui terkait bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kemenag Sumba Timur ?	Baik terima kasih ya dik, kalau penerapan sistem akuntansi berbasis akrual itu kalau di sini kita dilakukan melalui aplikasi yang namanya Sakti. Sakti itu sistem aplikasi tingkat instansi jadi semua hal sudah tercatat di Sakti dulu baru bisa ajukan ke bendahara Umum negara.
2.	Lalu, sejak kapan sistem akuntansi berbasis akrual ini di	Sebetulnya ini berlaku dari tahun 2015, oh ya dasar hukumnya itu ada

No.	Pertanyaan	Jawaban
	terapkan di Kemenag Sumba Timur? dan dasar hukumnya apa?	keputusan menteri agama nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan standar dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian agama.
3.	Sejauh pengalaman ibu sebagai PPK saya mohon penjelasan singkat terkait perbedaan pengelolaan keuangan dengan akuntansi berbasis akrual saat ini dengan sistem yang lama yang berbasis Kas ?	Oke, untuk perbedaannya kalau pengelolaan keuangan berbasis akrual dengan dengan sistem kas itu kalau akrual sudah dicatat terlebih dahulu sebelum kas itu keluar sedangkan kalau yang kas tunggu uang itu keluar dulu baru dicatat jadi kalau di sini walaupun belum jadi SP2D biasanya akan kita ajukan ke KPPN untuk SP2D sebelum jadi SP2D sudah dicatat terlebih dahulu itu keuntungannya jadi kita sudah tahu, oh ternyata ada uang yang nanti misal tanggal sekian sudah ada uang yang keluar.
4.	Menurut ibu sebagai salah satu Pejabat Pengelola Anggaran /PPK di Kantor Kemenag Sumba Timur ini apa manfaat yang dirasakan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual dalam pengelolaan anggaran?	Manfaatnya sangat bagus, jadi semua pencatatan itu jadi lebih tepat dan akurat sehingga data yang kami punya juga lebih bagus, lebih tepat karena kita sudah tahu jumlahnya berapa nanti.
5.	Selaku PPK di Kantor ini bagaimana peran dan tanggung jawab ibu dalam pengendalian proses pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan pada Kantor Kemenag Sumba Timur?	Peran dan tanggung jawab saya sebagai ppk di sini yaitu saya akan melakukan verifikasi duluan sebelum pengajuan anggaran ke KPPN itu, saya verifikasi dulu dilihat apakah ini sudah cocok dia punya akun dan sebagainya.
6.	Faktor apa saja yang sangat berpengaruh pada penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Sumba Timur?	Faktor yang sangat berpengaruh itu adalah SDM karena semuanya kan pakai aplikasi jadi kalau sdm-nya bagus otomatis juga semuanya jadi lebih mudah.
7.	Yang Terakhir. Saya ingin mengetahui berapa kali dalam satu tahun Pelaporan Keuangan dilakukan di satker Kemenag Kab.Sumba Timur?	Kalau laporan keuangan itu di sini sedalam setahun itu dilakukan tiga kali ada triwulan, ada semesteran dan ada tahunan.

Narasumber: Bendahara Pengeluaran

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor Kemenag Kab. Sumba Timur ini, bagaimana mekanisme yang ibu lakukan selama ini dalam pengelolaan dan penataan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual?	Iya baik, di sini kita berbicara tentang sistem akuntansi akrual, ya sistem akuntansi akrual itu sistemnya agak berbeda dengan sistem yang lama ya kalau sistem yang akrual itu lebih ke transparansi kemudian dengan laporan-laporan yang lebih ke akurasi nah sedangkan di dalam sistem akuntansi yang berbasis akrual ini antara lain, itu yang pertama menerima uang persediaan kemudian menyimpan itu menata usahakan dan membukukan uang kemudian ada beberapa surat-surat berharga yang dikelola kemudian melakukan pengujian pembayaran berdasarkan dari perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) jadi sebelum ibu mengambil keputusan ibu harus konsultasi dulu dengan PPK dulu, nah kemudian ada beberapa perintah contohnya apabila ada pembayaran di situ ada yang ibu pertimbangkan dulu mungkin ada pembayaran itu yang ibu tolak yang bisa direalisasi dan ada pembayaran yang bisa direalisasikan, nah kemudian ibu itu melakukan pemotongan pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara yaitu pajak jadi ada potongan pajak di situ yang ibu harus setor ke negara itu setiap bulannya, kemudian ada pengelolaan rekening tempat penyimpanan uang persediaan, kemudian yang terakhir ada penyampaian LPJ setelah ibu mengelola semua keuangan itu ibu harus melaporkan lewat LPJ itu. Jadi ada beberapa tahap nanti di LPJ itu yang ibu kelola yang ibu harus laporkan kemudian LPJ ini ibu harus menyampaikan ke KPPN mereka, nah semua uang persediaan yang ibu sudah

No.	Pertanyaan	Jawaban
		realisasikan yang sudah dikeluarkan kemudian ibu buat laporan ibu harus laporkan di KPPN itu setiap akhir bulannya.
2.	Apa saja kendala yang ibu alami selama menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran, baik dalam hal pencairan anggaran, membelanjakan, menyusun laporan keuangan dan mengarsipkan dokumen keuangan?	Kalau untuk kendalanya itu lebih ke sistem, sistem apabila jaringan itu error kendala yang terbesar di situ itu apabila terjadi error pada sistem itu menghambat semua proses baik pencairan maupun pelaporan itu selalu menjadi hambatan.
3.	Selanjutnya saya mohon penjelasan singkat dari ibu apa perbedaan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual saat ini dengan sistem yang lama yang berbasis Kas ?	Ya, mungkin ibu jelaskan dulu yang berbasis akrual saat ini ya kalau sistem akrual itu akuntansi yang berdasar. Sistem akrual itu penerapan akuntansi yang berbasis dapat meningkatkan transparansi transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan. Transparansinya itu karena saat ini kita melakukan transaksi menggunakan online jadi uang semua itu non tunai kemudian di situ kita bisa langsung mengontrol, jadi uang yang tersisa berapa yang sudah dibelanjakan berapa jadi semuanya terkontrol. Jadi tidak ada uang tunai yang tersisa di luar, jadi tersisa berapapun uang-uang di dalam rekening langsung terbaca dengan sistem seperti itu. Kemudian kalau untuk yang yang lama ya dek ya, yang berbasis kas itu biasanya kita mengajukan UP kita menerima UP uang persediaan itu kita mencatat, kita harus mencairkan dulu uang-uang tunai itu di bank kita harus ke bank kemudian kita arsipkan kita mencatat uang yang sudah kita terima ini berapa. Kemudian pengeluaran kita itu berapa itu semuanya harus dicatat itu kalau yang sistem kas. Kalau yang lebih akurasi sekarang itu lebih yang ke akrual, jadi kita tidak perlu mengantri di bank untuk mengambil uang tunai berlama-

No.	Pertanyaan	Jawaban
		lama di bank kemudian kita membelanjakan ke toko-toko. Kalau yang akrual ini yang lebih apa ya lebih transparansi seperti itu. Ya kalau yang berbasis akrual sekarang kita menggunakan CMS nah CMS itu keluar masuknya uang itu dari CMS. CMS itu <i>cash management system</i> yaitu fasilitas keuangan dengan non tunai nah kita mengontrol dimana nih pengeluaran kita lewat <i>virtual account</i> jadi ada aplikasi <i>virtual account</i>.
4.	Faktor apa saja yang sangat berpengaruh pada penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Sumba Timur?	Itu ada beberapa faktor yang berpengaruh di situ, yang pertama SDM itu harus itu penting kemudian komitmen kita, kita harus berkomitmen dalam pengelolaan keuangan. Kemudian ada pengendalian internal, pengendalian internal ini merupakan pengawasan ataupun keamanan kita harus diawasi. Kemudian ketelitian kita keakuratan data kita sesuai tidak data yang kita sampaikan ini. Kemudian ketelitian kita dalam mengelola keuangan itu penting uang yang masuk berapa, uang yang keluar itu berapa itu penting sekali. Kemudian bukan cuman itu pemotongan pajak, pajak ini kita harus tertib kalau kita tidak tertib dengan pajak itu menyulitkan kita karena pajak nggak boleh terlambat dek iya. Kemudian efisiensi jadi ada ketelitian, keakuratan data, kemudian ada efisiensi, kemudian harus ada kualitas teknologi ini nih yang kita gunakan nih ini harus terupdate harus pada kualitasnya, jadi kita harus mengupdate terus karena aplikasi yang kita terima itu didukung tidak sama, alat yang kita gunakan nih harus ada dukungan itu teknologi dan informasi karena di saat kita mengupload LPJ atau laporan lainnya kadang data itu kurang dukung jadi mau nggak mau

No.	Pertanyaan	Jawaban
		fasilitas yang kita gunakan ini harus interaktif. Kemudian ada motivasi-motivasi diri kita sendiri, motivasi dari pimpinan itu penting harus. Kemudian yang terakhir ada pelatihan staf keuangan karena sewaktu-waktu aplikasi ini akan di Update jadi kita harus mengikuti pelatihan harus ada tetap latihan setiap waktu.
5.	Dokumen apa saja sebagai yang ibu siapkan sebagai data dukung dalam pengarsipan dan pelaporan keuangan?	Yang pertama LPJ, ini LPJ laporan keuangan nah di dalam lpj itu ada buku kas Umum, kemudian ada buku-buku pembantu, kemudian ada buku pengawasan anggaran, buku pengawasan anggaran itu yang sudah direkonsiliasi oleh KPPN, kemudian ada rinci ada daftar rincian saldo berkaitan dengan saldo yang diterima berapa dan yang sudah keluar keluar itu berapa, kemudian ada saldo akhir ada rekening koran, rekening koran itu nanti kita ambil dari CMS itu nah kemudian ada berita acara pemeriksaan kas atau dan rekonsiliasi dan yang terakhir pajak setoran.

Narasumber: Operator Keuangan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai Operator Keuangan pada Kantor Kemenag Sumba Timur ini apa saja yang menjadi tugas bapak selama ini?	Tugas saya sebagai operator keuangan mengolah data aplikasi Sakti, berupa pembayaran gaji, pembuatan GU dan permintaan uang ke bendahara.
2.	Selama menjalankan tugas sebagai Operator Keuangan apakah bapak mengalami kendala dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual khususnya berkaitan dengan aplikasi keuangan?	Kalau sistem pengelolaan keuangan dia sudah berupa aplikasi untuk kesalahannya kemungkinan dia kecil karena dia berupa web tapi kalau kendala-kendala biasa di lapangan itu dia berupa kendala jaringan, ada perubahan apa pilihan menu-menu aplikasi mungkin kendalanya kecil tidak terlalu banyak.
3.	Selanjutnya saya mohon bapak menjelaskan sedikit tentang	Di aplikasi Sakti ini, kalau alur pelaporan aplikasi Sakti berbasis

No.	Pertanyaan	Jawaban
	alur pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual dalam hal ini aplikasi SAKTI?	akrual itu adalah sebagai ada beberapa pembukuan transaksi akrual di akrual <i>leader</i> pembuatan jurnalnya mempermudah pembuatan jurnalnya.
4.	Faktor apa saja yang sangat berpengaruh pada penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual di Kantor Kementerian Agama Sumba Timur?	Kalau untuk dari segi faktornya ini berupa sumber daya manusia, motivasi dan kompleks transaksi pemerintah itu lebih mudah dalam melakukan pencairan ke permintaan uang ke negara.
5.	Yang Terakhir, saya mohon penjelasan singkat dari bapak apa perbedaan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual saat ini dengan sistem yang lama yang berbasis Kas?	Oh, baik kalau yang berbasis kas itu pencatatan transaksi keuangannya mengutamakan pencatatan soal uang benar berpindah tangan dalam metode transaksi diakui dan dicatat hanya saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan itu berbasis kas. Sedangkan yang berbasis akrual suatu pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mencatat transaksi pada saat transaksi itu sendiri terjadi bukan pada saat uang benar-benar berpindah tangan.

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4. Tampilan *Cash Management System* (CMS)



Lampiran 5. Transaksi Pembayaran Melalui *Cash Management System* (CMS)

Wednesay, 19 March 2025 01:46 PM
MU/MRS. YAKOBIS OKTAVIANUS | STK0423212 KEMENAG KAB SUMBA TIMUR

CMSBRI

Payment & Purchase

BILL PAYMENT

- PLN
- TELKOM
- CREDIT CARD
- BPJS KETENAGAKERJAAN
- TAX
- SINGLE TAX
- Query
- SINGLE MPN

HELPDESK CMS
021-5758965/45/46
Email : cash_mgt@bri.co.id

FILTER DATA

Jenis MPN : MPN Gen 2
NPWP :
Tax Category :
KPPN :
Kode Billing :
Print Report : Slip | xls | Print

Debet Account :
Transaction Date :
Keterangan/No.Faktur :
Status : Success
Record Summary : ALL
Maker :
Sort By : Transaction Date on DESC
Update Filter

DATA TRANSAKSI

Print Lembar ke : ALL

ID Slipen	Procode	Details	Status	EDI Status	Print BPN	Print Slip	Print PIB
240202907643	301100	Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 47.500,00 NTRN : C04A5550CMF2 No Ref : Kode Billing : Kata WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Jumlah Setoran : 363.900,00 NTRN : 402C31EDKATK103 No Ref : Kode Billing : Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing : Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing :	SUCCESS		Print	Print	
240202906596	301100	Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 363.900,00 NTRN : 402C31EDKATK103 No Ref : Kode Billing : Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing : Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing :	SUCCESS		Print	Print	
240131407537	301100	Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing : Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAS Kata WP : KPPN Jumlah Setoran : 95.827,00 NTRN : No Ref : Kode Billing :	SUCCESS		Print	Print	

Lampiran 6. Transaksi Belanja Perjalanan Dinas

Wednesay, 19 March 2025 01:52 PM
MU/MRS. YAKOBIS OKTAVIANUS | STK0423212 KEMENAG KAB SUMBA TIMUR

CMSBRI

Fund Transfer

INTERNAL

- SINGLE FT
- Verify
- Query
- COLLECTIVE FT
- PAYROLL

EXTERNAL

- SINGLE RTGS
- SINGLE CH

OTHER

- PAYMENT PRIORITY

HELPDESK CMS
021-5758965/45/46
Email : cash_mgt@bri.co.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Faks (62-21) 5700914

Single Internal Fund Transfer - Slip

Sender Information

Account Number : 6525-94-232121-00-0 (IDR)
Account Name : BRG 041 KEMENAG KAB SUMBA TIMUR

Beneficiary Information

Account Number : 0039-01-061056-50-8 (IDR)
Account Name : HUKI YEANRI OKTOVIAN

Transaction Information

Reference Number : 0374515378034998
Amount : 1,510,000.00 IDR
Remark : VA652594232121000Lunsum dan trasnport perjadin pimpinan
Date & Time : 28/02/2025 - 14:21:17 WIB
Status : Transaction Success

Printed From Cash Management System BRI - 28/02/2025 - 13:53:17

Back Print

Lampiran 7. Piagam Penghargaan



Biografi Penulis



Penulis bernama Yusuf Ary Tanggumara lahir di Waingapu pada tanggal 16 Januari 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yakobus Hau Tanggumara dan Ibu Chatarina Sri Rohana. Pendidikan formal penulis yakni SD Masehi Payeti 2 tamat pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Waingapu tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMA Katolik Andaluri dengan jurusan IPS dan tamat pada tahun 2021. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur” untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.